

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianty (2017). Tinjauan Atas Asas Keadilan & Kemudahan Administrasi Pajak Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Final 1% Terhadap Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/jvi.v5i1.66>.
- Baskara, Saifi, & Za, (2018). Evaluasi Tingkat Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Th.2011-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*/Vol, 56(1), 29–37.
- Basuki dan Prawoto. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (1st ed.; P. R. Persada, ed.). Jakarta.
- Devanty. (n.d.). Peran Koperasi Wanita dalam Upaya Pemberdayaan *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Semangat dan komitmen pemerintah untuk melaksanakan strategi pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan tidak pernah kendur . 472–498.*
- Endrianto, (2015). Prinsip Keadilan dalam Pajak atas UMKM. *Binus Business Review*, 6(2), 298. <https://doi.org/10.21512/bbr.v6i2.978>
- Fallis. (2018). Kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 di Kota Gede Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara*, 1(23), 10. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Fhyel, (2016). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak.*
- Hendri. (2018). Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Vokasi Indonesia*, 6(2), 53–58. <https://doi.org/10.7454/jvi.v6i2.127>
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan penerbit - Undip.
- Kemenkeu. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Jakarta*, 1–9.
- Kemenkeu. (2009). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. *Jakarta*

- Kemenkeu. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. *Jakarta*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Apbn 2019. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 64. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016* (18th ed.). Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012. *Tentang Perkoperasian*,
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992. *Tentang Perkoperasian*, 1–28. <https://doi.org/10.1590/s1809-98232013000400007>
- Mustari dan Zain. (2017). *Analisis Regresi Tobit Spasial: Studi Kasus Penggunaan Internet di Pulau Jawa*. v.9.1.2017.
- Nordiawan & Hertianti. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurgustiani (2017). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Serta Dampaknya Pada Efektivitas Penerimaan Pajak. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung*.
- PSAK ( *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* ) Nomor 27 Tahun 2007 *Tentang Akuntansi Perkoperasian*.
- Resmi. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianto. (2010). *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- Santoso. (2014). *Statistik Multivariat Edisi Revisi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sari, (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, X(12), 19–23.
- Sugiarto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis* (1st ed.; Yeskha, ed.). Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sumarsan. (2017). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru (Edisi 5)* (PT Indeks, ed.). Jakarta.

Suryani, Maslichah, & Junaidi. (2019). Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Di KPP Pratama Pasuruan. *E-Jra*, 08(02), 32–41.

Tatik. (2018). *Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*.

Wulandari, & Budiaji, (2018). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 239–268. <https://doi.org/10.32678/ije.v8i2.71>